

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan satuan pendidikan yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. SMK memiliki fungsi untuk menghasilkan tenaga kerja level menengah yang harus siap untuk bekerja. Proses pendidikan di SMK perlu terus diarahkan untuk mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja. Kurikulum sebagai jantungnya proses pendidikan memegang peranan yang sangat strategis untuk menghasilkan lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Salah satu prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip relevansi.

Masalah relevansi kurikulum di pendidikan kejuruan (termasuk di SMK) menjadi isu yang krusial sepanjang masa. Merancang kurikulum yang relevan di pendidikan kejuruan merupakan tugas yang harus terus menerus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Kurikulum memiliki dua mata pisau. Satu sisi menjadi kekuatan terbesar atau bahkan menjadi kelemahan terbesar dalam pendidikan kejuruan. Kurikulum pendidikan kejuruan yang dikembangkan dengan selalu mengacu pada prinsip relevansi ini, merupakan dasar bagi banyak keputusan penting yang akan memberikan arah yang tepat bagi keberhasilan perencanaan dan implementasi program di pendidikan kejuruan (Komla, 2011).

Relevansi kurikulum menjadi penting untuk dikaji mengingat perubahan di masyarakat yang sangat cepat akibat adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang cepat pula. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi menyebabkan kurikulum akan menjadi *out of date* apabila tidak segera menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Pengembang kurikulum harus terus berupaya melakukan penyesuaian karena tuntutan perubahan tersebut. *“Maintaining relevance in the vocational curricula is a never ending task”* O’Kelley (Miller,1985:116). Proses pengembangan kurikulum di pendidikan

kejuruan harus mempertimbangkan tiga faktor penting “... *changes in occupations, technology, and community*” (Oloruntegbe, 2010:8). Perubahan dalam pekerjaan menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja yang kompeten dan bidang-bidang pekerjaan yang berkembang secara dinamis, menjadi tantangan tersendiri bagi kurikulum pendidikan kejuruan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, tentu saja menuntut kualifikasi pekerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kurikulum pendidikan kejuruan harus selalu mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut. Salah satu tugas pendidikan kejuruan adalah melayani masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kurikulum harus dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mampu mendukung perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Relevansi akan menghubungkan antara potensi lapangan kerja yang ada dan kemampuan lulusan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tersebut. Lulusan dari pendidikan kejuruan yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang telah ditetapkan lapangan pekerjaan, maka pendidikan kejuruan dianggap “gagal” (Miller, 1985; Canavan, 2005; Hodge, 2011). Relevansi kurikulum akan sangat dipengaruhi oleh perubahan proyeksi, persyaratan pekerjaan saat ini, dan permintaan dari lapangan pekerjaan. Dinamisasi lapangan pekerjaan pada masa depan merupakan tantangan tersendiri bagi para pengembang kurikulum di pendidikan kejuruan.

Relevansi kurikulum dimaknai sebagai *the adaptive curriculum* (Sanjaya,2008:14). Kurikulum memiliki fungsi sebagai penyesuaian (*the adjustive*). Makna penyesuaian ini adalah kurikulum harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan berbagai pihak. Kurikulum yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*. Kebutuhan stakeholder yang dimaksud meliputi peserta didik, guru, pemerintah, ahli pendidikan, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja.

Perkembangan masyarakat dan dunia kerja bersifat dinamis dan berubah secara cepat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan yang sangat cepat di dunia kerja, mengisyaratkan bahwa kurikulum perlu selalu ditinjau ulang untuk melihat apakah masih ada kecocokan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Relevansi ini menjadi suatu kata yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari pendidikan kejuruan itu sendiri. "*Curricula for vocational education are derived from requirements in the world of work*" (Miller, 1985:118). Kurikulum yang relevan memiliki makna bahwa kurikulum tersebut dirancang berasal dari kebutuhan dunia kerja. Kurikulum pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia kerja harus memiliki prinsip *go hand in hand* (Miller, 1985:118; Oloruntegbe, 2010:59).

Relevansi kurikulum juga harus memenuhi kebutuhan internal kurikulum itu sendiri, yaitu adanya kesesuaian di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan evaluasi). Secara eksternal, kurikulum harus memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis). Kurikulum juga harus mampu memenuhi kebutuhan beragama manusia (Siraj, 2008).

SMK sebagai bagian penting dari sistem pendidikan kejuruan di Indonesia, terdiri dari enam bidang keahlian yaitu teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, seni kerajinan dan pariwisata, agribisnis dan agroindustri, serta bisnis dan manajemen (Direktorat Pembinaan SMK, 2012). SMK program keahlian tata busana merupakan bagian dari bidang keahlian pariwisata. Program keahlian lain yang berada pada kelompok pariwisata diantaranya program keahlian tata boga dan tata kecantikan. Tujuan kurikulum Program Keahlian Tata Busana adalah adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar memiliki kompetensi dalam bidang busana.

Keberadaan SMK program keahlian tata busana dalam suatu masyarakat sangatlah penting mengingat kebutuhan berbusana (sandang) merupakan kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan makanan (pangan) dan rumah (papan). Idealnya minat peserta didik untuk memasuki SMK program keahlian tata busana

seharusnya besar karena prospek dan peluang yang sangat menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan berbusana baik bekerja di industri maupun berwirausaha dalam bidang busana. Kenyataan yang cukup memprihatinkan justru diperlihatkan dengan minimnya jumlah peserta didik pada SMK program keahlian tata busana khususnya di wilayah Bandung yaitu SMK Negeri dan Swasta di Kota dan Kabupaten Bandung sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah peserta didik pada tujuh SMK program keahlian tata busana

NO	Nama SMK	Status	Wilayah	Jumlah Peserta Didik		
				Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3
1	SMKN 9	Negeri	Kota Bandung	70 (2 kelas)	63 (2 kelas)	65 (2 kelas)
2	SMK BPP	Swasta	Kota Bandung	13	11	16
3	SMK RA Kartini	Swasta	Kota Bandung	5	7	12
4	SMKN 2 Baleendah	Negeri	Kabupaten Bandung	53 (2 kelas)	32	38
5	SMKN 1 Rancaekek	Negeri	Kabupaten Bandung	28	13	16
6	SMK Pasundan Majalaya	Swasta	Kabupaten Bandung	8	17	23
7	SMK An-Nur Bun	Swasta	Kabupaten Bandung	13	16	28

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Bandung (2012)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa peminat peserta didik khususnya pada SMK Swasta di Kota dan Kabupaten Bandung dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan jumlah peminat. Jumlah peminat yang cenderung menurunpun diperparah dengan jumlah peserta didik tiap kelas yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat pada Bab IV Pasal 4 ayat 2 tentang SPM pendidikan SMK yang menyebutkan jumlah peserta didik SMK per kelas antara 30-40 orang.

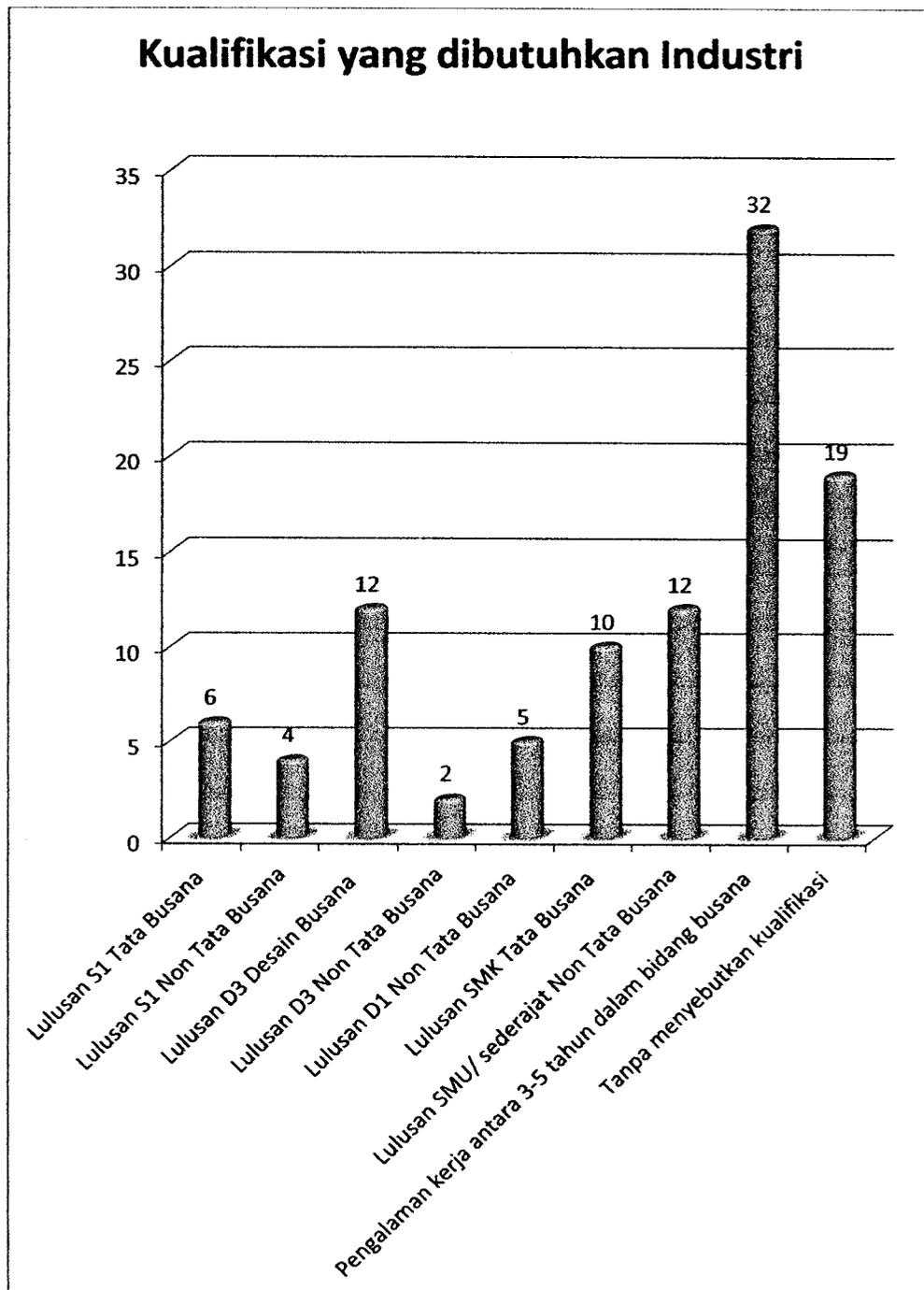
Kondisi peminat peserta didik pada SMK program keahlian tata busana di Bandung ini yang sedikit, tentunya tidak sesuai dengan citra Bandung sebagai kota mode dengan julukan *Paris pan Java*. SMK program keahlian tata busana

yang ada di wilayah Bandung sudah selayaknya menjadi pemasok utama tenaga kerja bagi industri bidang busana.

Potensi lain yang dimiliki oleh Bandung adalah sebagai pelopor kota industri kreatif bidang fesyen. Terpilihnya Bandung sebagai *pilot project* kota kreatif se-Asia Timur pada ajang pertemuan internasional ekonomi kreatif yang dilaksanakan di Yokohama Jepang pada akhir Juli 2007 menjadi peluang yang sangat besar bagi tenaga kerja lulusan SMK program keahlian tata busana untuk menjadi salah satu bagian penting dari arah perkembangan baru dari bidang industri ini.

Berbagai “prestasi cemerlang” yang telah dicapai oleh industri kreatif bidang fesyen ini, patut menjadi pertimbangan penting untuk arah pengembangan kurikulum SMK program keahlian tata busana di Bandung mengingat Bandung menjadi pelopor dari industri kreatif bidang fesyen. Data dari Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011) memperlihatkan bahwa industri kreatif bidang fesyen menjadi kontributor terbesar ekspor industri kreatif diantara 13 sub sektor industri kreatif lainnya. Total kontribusi industri kreatif fesyen ini mencapai 61,13% dari keseluruhan ekspor produk kreatif. Selain menjadi kontributor terbesar dalam ekspor, dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja dan lapangan usaha dalam periode yang sama, fesyen juga mendominasi sektor industri kreatif yaitu rata-rata sebesar 54,32% dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,13 juta orang atau 4,22% terhadap tingkat partisipasi terhadap tenaga kerja nasional.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah peluang lapangan pekerjaan di Bandung bagi lulusan SMK program keahlian tata busana yang juga kurang menggembirakan. Hasil penelitian tentang analisis lowongan pekerjaan dengan menggunakan metode *job vacancy* dilakukan oleh Suciati, dkk (2012). Metode penelitian tersebut dilakukan dengan menganalisis data lowongan pekerjaan bagi lulusan SMK program keahlian tata busana selama kurun waktu dua bulan terakhir pada surat kabar Pikiran Rakyat kolom “lowongan pekerjaan”.



Gambar 1.1. Kualifikasi lulusan yang dibutuhkan dunia industri busana di Bandung

Data yang berhasil dihimpun oleh tim peneliti sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 memberikan informasi bahwa dari 102 perusahaan yang bergerak dalam bidang busana, permintaan tenaga kerja lulusan SMK tata busana hanya

mencapai 10 dari 102 industri atau sebesar 9,8%. Permintaan tenaga kerja dari lulusan SMU justru jumlahnya lebih banyak dari permintaan tenaga kerja lulusan SMK tata busana. Data tersebut menunjukkan pula bahwa permintaan lulusan pendidikan formal bidang busana, baik jenjang pendidikan tinggi maupun menengah tingkat permintaan dari industri masih rendah. Pihak industri bidang busana lebih suka mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman kerja rata-rata 3-5 tahun dalam bidang busana. Kondisi ini menggambarkan bahwa industri bidang busana lebih suka mempekerjakan lulusan yang berasal dari jalur pendidikan non formal dibandingkan dengan jalur pendidikan formal.

Persoalan lain yang menunjukkan kurang baiknya citra SMK program keahlian tata busana dan bahkan pendidikan tata busana secara umum terlihat dari animo masyarakat untuk memasukkan putera-puterinya pada satuan pendidikan formal bidang busana lebih rendah dibandingkan dengan lembaga kursus bidang busana. Data yang diperoleh dari salah satu kursus menjahit di wilayah Bandung dan sekitarnya yaitu kursus menjahit “yani” memperlihatkan data bahwa lulusan SMP dan sederajat yang menjadi peserta kursus setiap tahunnya rata-rata berjumlah 35 orang untuk satu cabang kursus menjahit dari total 44 cabang yang ada di wilayah Bandung dan sekitarnya (Lembaga Kursus Menjahit Yani Pusat, 2012). Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan kursus dalam bidang busana lebih diminati dari SMK program keahlian tata busana.

Kajian yang lebih luas dari persoalan pendidikan SMK di Indonesia dapat dilihat pula dari data BPS tahun 2010 yang menunjukkan data bahwa prosentase pengangguran pada jenjang SMK menempati posisi tertinggi yaitu 14,59% pada tahun 2009 dan 17,26% pada tahun 2010. Tahun 2009 dan 2010 prosentase tertinggi pengangguran ada pada jenjang pendidikan SMK dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Kondisi ini menjadi lebih kritis karena rasio jumlah SMK mulai tahun 2010 secara bertahap ditingkatkan menjadi 67% SMK : 33% SMU (Renstra Kemendiknas 2010-2014). Rasio peningkatan jumlah SMK yang cukup signifikan tersebut akan berakibat pada penambahan jumlah angkatan kerja level menengah yang semakin banyak. Persoalan baru akan muncul apabila

jumlah angkatan kerja lulusan SMK tersebut tidak dibarengi dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tingkat keberhasilan pendidikan di SMK harus diukur sebagai *rate of return*, tidak cukup dengan *social return*. Tamatan SMK yang masih banyak menganggur dan lamanya mendapatkan pekerjaan harus diperhitungkan sebagai indikator belum berhasilnya pendidikan di SMK (Djojonegoro:1998).

Indikator relevansi kurikulum SMK yang masih rendah didukung oleh hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah (BPPP, 2008) bahwa jumlah lulusan yang dapat diserap dunia kerja berjumlah kurang dari 50%. Studi GTZ (2009) memperlihatkan gambaran bahwa *output* pendidikan SMK khususnya dalam aspek *softskills* belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Masalah ini disebabkan oleh sistem pendidikan (termasuk di dalamnya kurikulum) SMK belum mampu membekali siswa dengan keahlian yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kritik yang cukup “tajam” dilontarkan oleh Pakpahan (2002) dan Djojonegoro (1998) yang menyatakan bahwa beberapa sekolah SMK sering “terasing” dari dunia kerja yang membutuhkannya. Kompetensi yang diajarkan di sekolah menjadi kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. SMK kurang mengenal *sense of economy* karena hasil pekerjaan yang dilakukan di sekolah tidak terkait dengan kebutuhan *market* yang menuntut kualitas terbaik. Tamatan SMK kurang memiliki wawasan mutu (*sense of quality*), karena di sekolah kurang diajarkan resiko kerugian atas kegagalan pada saat melakukan proses produksi. Berbeda dengan sekolah, industri memandang bahwa kegagalan adalah kerugian yang harus ditanggung oleh pekerja dan perusahaan. Proses pembelajaran yang dilakukan di SMK belum mampu membangun etos kerja yang baik seperti tuntutan dunia kerja.

Dampak dari kurang relevannya kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia kerja apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan lahirnya lulusan yang *underqualified*. Kondisi tersebut tentu saja akan menyebabkan daya saing tenaga kerja di Indonesia menjadi rendah. Tantangan global tenaga kerja Indonesia dengan pemberlakuan berbagai konvensi Internasional diantaranya GATS

(General Agreement on Trade in Service), WTO (World Trade Organization), AFTA (Asean Free Trade Area), menjadikan tantangan yang cukup berat bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang tidak mampu bersaing dalam kancan Internasional, akan berakibat pada keberadaan tenaga kerja Indonesia digantikan oleh tenaga kerja asing yang dengan mudah dan leluasa dapat masuk ke Indonesia.

Kualitas lulusan SMK secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh pada perekonomian suatu negara. Kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang *unemployable* akan menyebabkan pengaruh yang kurang menguntungkan pada perekonomian suatu negara sehingga akan menimbulkan gejala *economically inactive* (Oloruntegbe, 2010). Pendidikan kejuruan sebagai jenis pendidikan yang bertugas menghasilkan tenaga kerja berkualitas untuk mengisi jenis pekerjaan tertentu di dunia industri memiliki pengaruh yang cukup penting pada aspek sosial dan politik di suatu negara. “*Vocational education plays a key role in economical, social, and political development of every nation*” (Amankwah, 2011:107).

Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat akan menyebabkan pendidikan kejuruan tidak dapat bertahan dengan baik. Pendidikan kejuruan akan dapat bertahan (*the educational vocational survival*) apabila kurikulum dapat berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas lulusan yang dihasilkan untuk mengisi lapangan kerja tersebut. Begitu pula sebaliknya, lulusan SMK akan mampu bertahan (*the learner survival*) di dunia kerja apabila fungsi relevansi kurikulum ini dapat berjalan dengan baik. Jenis pekerjaan berubah, kurikulum juga harus berubah, demikian pula dengan para pekerjanya (Matthew, 2010).

Upaya untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat merupakan “harga” yang tidak dapat ditawar lagi. Proses mengembangkan kurikulum yang relevan memerlukan usaha yang serius dan berkesinambungan. Matthew (2010:90) mengemukakan bahwa untuk menjaga relevansi antara program pendidikan kejuruan dengan dunia kerja maka: “...*curriculum must be reviewed, enriched, and update regularly in line with changes that are taking place in the industries*”. Lebih tegas, Komla (2011:57)

memberikan strategi bagaimana memastikan adanya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Komla memberikan tiga komponen yang perlu diperhatikan yaitu “*..meeting the need individual, meeting the needs of the society, dan meeting the needs of the economy*”. DuPre (2011) bahkan menjamin apabila kurikulum yang dikembangkan telah relevan dengan kebutuhan dunia kerja, maka akan memberikan arah yang baik bagi pengembangan sistem ketenagakerjaan di masa depan “*...this connection between education and employment is exemplified in today's depressed job market, whrere there are more applicants for fewer job*”.

Proses melakukan relevansi kurikulum dapat dilakukan dalam skala mikro dan makro. Upaya relevansi kurikulum dapat dilakukan dalam arti pembaharuan secara luas (*major curriculum reform*) maupun penyesuaian secara terbatas (*minor curriculum reform*). Pembaharuan kurikulum secara luas dilakukan mengikuti siklus 4-5 tahun sekali yang dilakukan oleh pengambil kebijakan yang lebih tinggi, yaitu pemerintah pusat dalam skala nasional (Hadiwaratama,2002). Upaya melakukan penyesuaian di tingkat sekolah justru lebih strategis dilakukan oleh para guru. Penyesuaian secara informal melalui *briefing* maupun secara formal dalam wadah *In House Training* (IHT). Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah perlu dilakukan secara serius dan berkala. Proses penyesuaian kurikulum ini harus melibatkan institusi pasangan industri SMK masing-masing sehingga dapat diketahui kompetensi yang dibutuhkan dari waktu ke waktu yang sudah pasti berubah sesuai perkembangan zaman.

Relevansi kurikulum merupakan salah satu ukuran dari mutu pendidikan yang baik. Standar mutu (*quality assurance*) merupakan alat dan mekanisme agar kurikulum tetap terjaga kualitasnya. Relevansi kurikulum akan terjamin dengan baik apabila kebutuhan internal dan eksternal dari kurikulum itu sendiri dipetakan dalam bentuk parameter yang mampu mengukur tingkat relevansi kurikulum (Direktorat PSMK, 2012). Parameter tersebut yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi, waktu dan lokasi.

Isu pentingnya kurikulum SMK yang relevan dalam suatu proses pendidikan mengisyaratkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kurikulum yang ada. Kurikulum SMK perlu dianalisis tingkat relevansinya dengan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan internal maupun eksternal. Proses evaluasi kurikulum dalam bentuk analisis relevansi kurikulum perlu dilakukan agar kurikulum dapat dievaluasi secepat mungkin dan dapat segera diperbaharui sesuai dengan tuntutan kebutuhan internal dan eksternal kurikulum.

Pentingnya evaluasi kurikulum ini sejalan dengan ketetapan perundang-undangan yang menuntut dilakukannya evaluasi kurikulum baik kurikulum sebagai dokumen maupun kurikulum sebagai suatu sistem. Evaluasi kurikulum perlu dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan (Pasal 57 UU Nomor 20 tahun 2003). Hasil dari proses evaluasi kurikulum akan mampu memberikan peta kekuatan maupun kelemahan dari kurikulum yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Proses evaluasi kurikulum ini menjadi penting dilakukan mengingat karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku saat ini dirancang dengan prinsip desentralisasi sehingga setiap satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kondisi inilah, peluang untuk menerjemahkan kurikulum dengan persepsi yang sangat beragam di tiap sekolah akan memunculkan perbedaan dalam mengembangkan kurikulum.

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis relevansi kurikulum SMK sehingga akan didapat peta kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan dalam aspek relevansi kurikulum dengan berbagai tuntutan kebutuhan internal maupun eksternal kurikulum.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini berawal dari adanya fakta di lapangan bahwa citra pendidikan tata busana pada jenjang SMK cukup memprihatinkan. Indikator ini

dapat dilihat dari minimnya jumlah peminat untuk masuk ke SMK program keahlian tata busana, daya serap lulusan pada industri busana di Bandung yang masih rendah, dan masyarakat khususnya lulusan SMP lebih memilih untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan non formal yaitu di lembaga kursus menjahit.

Persoalan dalam lingkup yang lebih luas yaitu masalah pengangguran dari lulusan SMK yang juga memperhatikan. Proses pendidikan di SMK yang dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja menjadi bertentangan dengan fakta di lapangan. Kondisi tersebut menjadi sangat ironis dengan masih adanya keluhan dari pihak industri tentang kompetensi lulusan SMK yang belum sesuai dengan tuntutan standar dunia kerja. Kondisi ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan kualitas pendidikan di SMK menjadi tidak maksimal. Asumsi yang paling mengemuka penyebab masalah ini terjadi adalah kurikulum yang dianggap kurang relevan.

Ruang lingkup kajian relevansi kurikulum dapat ditinjau dari berbagai pertanyaan sebagai berikut: “mengapa citra SMK program keahlian tata busana belum baik serta bagaimana kondisi relevansi kurikulum SMK saat ini?”, “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi relevansi kurikulum SMK”?, serta “bagaimana mengembangkan kurikulum yang relevan baik pada aspek desain maupun implementasi?”. Pertanyaan pertama dapat dijawab dengan melakukan penelitian survei, yang kedua dengan melakukan analisis faktor, dan yang ketiga dengan melakukan penelitian *R and D*. Penulis memilih pertanyaan yang pertama dengan asumsi penelitian survei akan mampu memetakan tentang komponen relevansi kurikulum serta memetakan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang dari kurikulum yang ada. Data awal ini dapat dijadikan sebagai dasar melakukan penelitian lanjutan yaitu tentang analisis faktor relevansi kurikulum dan mengembangkan model kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Relevan kurikulum dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan relevansi antar komponen kurikulum yaitu komponen tujuan, konten, strategi penyampaian, dan evaluasi. Relevansi

eksternal berkaitan dengan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, kualifikasi guru, kebutuhan dunia kerja, perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan beragama. Kebutuhan peserta didik terdiri dari minat, cita-cita, dan kebutuhan untuk memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Relevansi eksternal juga terkait dengan kualifikasi guru sebagai pendidik yang akan menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran di SMK. Kualifikasi guru yang dimaksud berkaitan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja di industri, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kepemilikan sertifikat pendidik. Sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dari relevansi eksternal kurikulum. Peralatan yang dimiliki SMK dari jumlah, jenis, dan spesifikasinya dengan kondisi peralatan yang ada di dunia kerja mempengaruhi relevansi kurikulum yang ada. Peralatan yang memadai akan mampu memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan kelak di dunia kerja.

Industri sebagai pihak pengguna (*demand*) menjadi barometer utama untuk mengembangkan kurikulum yang relevan oleh pihak SMK. Berbagai kompetensi *hardskill* maupun *softskill* yang dikembangkan dalam kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. SMK sebagai pihak pemasok (*supply*) perlu merespon dengan baik kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan mengembangkan kurikulum yang relevan. Ketidaksesuaian antara kebutuhan pengguna (*demand*) dan penghasil lulusan (*supply*) akan menimbulkan banyak permasalahan diantaranya pengangguran. Kondisi ini apabila dibiarkan terus - menerus akan berdampak pada menurunnya kuantitas dan kualitas pendidikan di SMK.

Relevansi kurikulum dengan perkembangan IPTEKS terkait dengan sejauhmana kurikulum yang dikembangkan mampu merespon dan menyelaraskan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi bagian penting yang harus direspon oleh kurikulum.

Kurikulum juga harus relevan dengan kebutuhan beragama dari peserta didik ataupun masyarakat secara luas. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan dan memiliki nilai-nilai religius yang perlu diajarkan dan diamankan

dengan baik oleh pengikutnya perlu menjadi pertimbangan kurikulum itu sendiri. Tujuan pendidikan nasional telah sangat jelas menggambarkan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan saja, justru yang paling penting adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berahlak mulia.

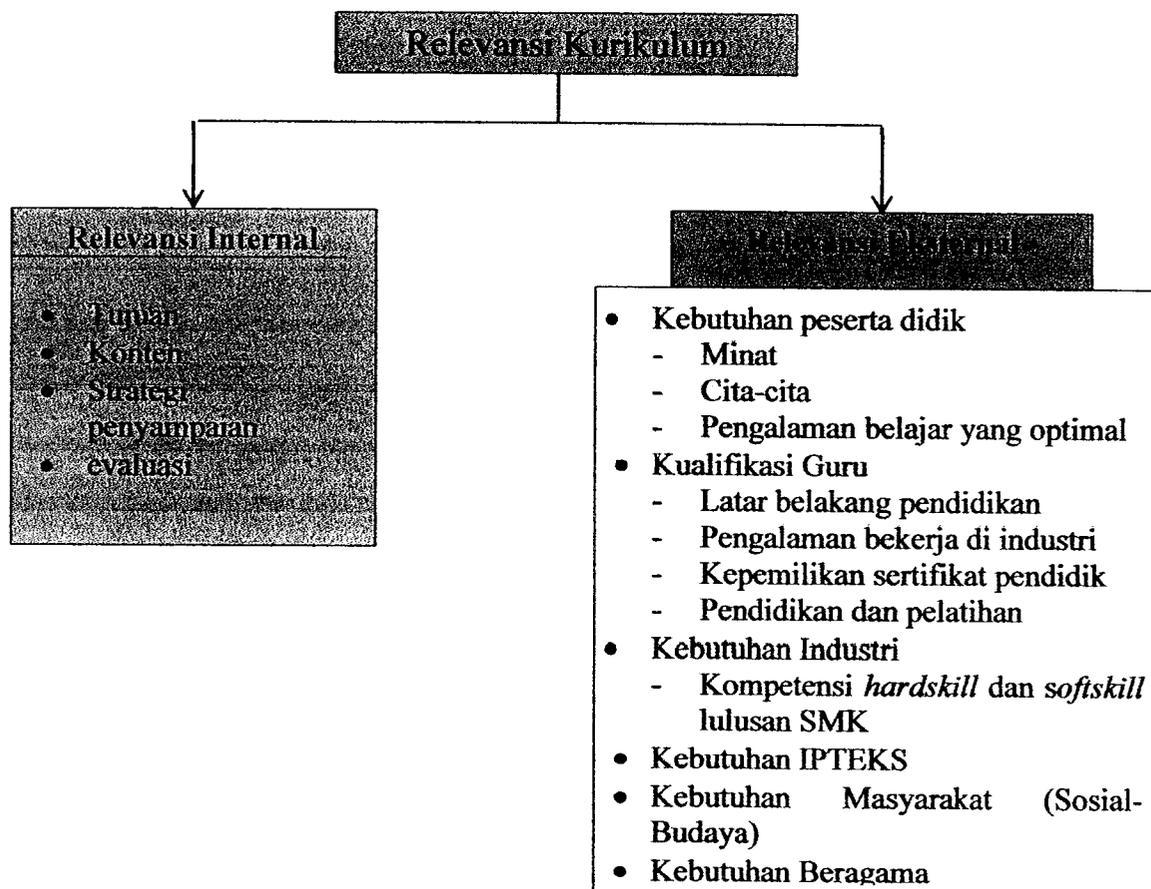
Fokus penelitian tentang aspek relevansi kurikulum SMK terdiri dari dua, yaitu internal dan eksternal. Relevansi internal terdiri dari komponen tujuan, konten, strategi penyampaian, dan evaluasi. Relevansi eksternal terdiri dari relevansi dengan kebutuhan peserta didik, kualifikasi guru, kebutuhan industri, IPTEKS, dan beragama. Kebutuhan peserta didik terdiri dari minat, cita-cita, dan perolehan pengalaman belajar yang optimal. Kualifikasi guru terdiri dari latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja di industri, kepemilikan sertifikat pendidik, dan pengalaman pendidikan pelatihan dalam bidang busana. Kebutuhan industri terdiri dari kebutuhan untuk memperoleh lulusan SMK dengan kompetensi *hardskill* dan *softskill* yang memadai.

Kebutuhan IPTEKS berkaitan dengan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni pada masa sekarang dan masa depan. Teknologi yang berkembang saat ini adalah teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pendidikan. Aspek seni perlu menjadi perhatian juga dalam mengembangkan kurikulum yang relevan untuk keseimbangan perkembangan seorang manusia.

Kebutuhan masyarakat lebih dikhususkan pada kebutuhan aspek nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Busana adalah sebuah representasi dari nilai-nilai sosial dan budaya suatu masyarakat. Sebuah nilai sosial dan budaya akan menggambarkan karakter dan ciri khas dari masyarakat tersebut.

Kebutuhan beragama merupakan bagian penting juga dalam mengembangkan kurikulum yang relevan. Kebutuhan beragama bagi peserta didik dan masyarakat secara luas perlu direspon dengan baik dalam kurikulum. Kurikulum dalam konteks ini memiliki fungsi transendental (vertikal) di samping memiliki fungsi kemasyarakatan (horisontal).

Aspek yang menjadi bagian penting dari relevansi kurikulum di SMK ditunjukkan pada gambar 1.2 di bawah ini:



Gambar 1.2. Variabel penelitian relevansi kurikulum

2. Perumusan Masalah

Identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu menjadi dasar untuk merumuskan masalah penelitian. Secara umum masalah utama penelitian ini adalah diperlukannya analisis aspek relevansi kurikulum yang dapat memberikan peta informasi tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang relevansi kurikulum SMK Program Keahlian Tata Busana.

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana menganalisis relevansi kurikulum SMK negeri dan swasta Program Keahlian Tata Busana di Kota dan Kabupaten Bandung?”. Hasil analisis tersebut akan menjadi

bahan penting untuk melakukan pemetaan aspek kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang dari masing-masing SMK untuk perbaikan kurikulum di masa yang akan datang. Sub rumusan masalah dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi kurikulum SMK negeri dan swasta Program Keahlian Tata Busana di Kota dan Kabupaten Bandung? Pertanyaan penelitian ini diarahkan pada dua aspek yaitu:
 - 1) Bagaimana kondisi dokumen kurikulum yang dikembangkan meliputi rumusan tujuan, materi, strategi penyampaian, dan evaluasi?
 - 2) Bagaimana kondisi kurikulum sebagai suatu sistem yang terdiri dari kondisi peserta didik, guru, lulusan, institusi pasangan industri, dan proses pengembangan kurikulum SMK?
- b. Bagaimana kondisi relevansi kurikulum SMK negeri dan swasta Program Keahlian Tata Busana di Kota dan Kabupaten Bandung?
 - 1) Bagaimana kondisi relevansi kurikulum internal mencakup kesesuaian rumusan antar komponen kurikulum yaitu tujuan, konten, strategi penyampaian, dan evaluasi ?
 - 2) Bagaimana kondisi relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik yang meliputi kesesuaian kurikulum dengan minat, cita-cita, dan kebutuhan untuk memperoleh pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik ?
 - 3) Bagaimana kondisi relevansi kurikulum dengan kualifikasi guru yang meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja di industri, kepemilikan sertifikat pendidik, dan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang busana?
 - 4) Bagaimana kondisi relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri yang meliputi kebutuhan *hardskill* dan *softskill* lulusan SMK serta program pendidikan yang dikembangkan oleh SMK ?
- c. Bagaimana peta relevansi kurikulum empat SMK yaitu SMKN 9 Bandung, SMKN 2 Baleendah Kabupaten Bandung, SMK BPP Bandung, dan SMK Pasundan Majalaya Kabupaten Bandung dengan mempergunakan analisis SWOT?

- d. Bagaimana arah pengembangan kurikulum SMK program keahlian tata busana di masa depan?

3. Definisi Operasional

Definisi operasional dijabarkan berdasarkan judul penelitian “Relevansi Kurikulum SMK Program Keahlian Tata Busana di Kota dan Kabupaten Bandung”. Penjelasan tentang variabel dalam penelitian ini diarahkan untuk menyamakan persepsi tentang analisis relevansi kurikulum SMK Program Keahlian Tata Busana.

a. Relevansi Kurikulum

Relevansi kurikulum merupakan salah satu prinsip dari kurikulum yang mengandung makna penyelarasan, kesesuaian, kejelasan, *relationship*, serta berjalan seiring antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kurikulum dalam konteks penelitian ini dilihat dari aspek kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai sistem. Sistem yang dimaksud berkaitan dengan peserta didik, guru, proses pembelajaran, dan institusi pasangan industri SMK.

Relevansi kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari dua dimensi yaitu relevansi internal dan eksternal (Miller, 1985; Sukmadinata, 2006; Sanjaya, 2008). Relevansi internal meliputi relevansi antar komponen kurikulum yaitu tujuan, konten, strategi penyampaian, dan evaluasi kurikulum. Relevansi eksternal berkaitan dengan relevansi kurikulum dengan berbagai kebutuhan di luar kurikulum yaitu :

- 1) Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik yang meliputi kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan minat, cita-cita, dan kebutuhan untuk memperoleh pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik.
- 2) Relevansi kurikulum dengan kualifikasi guru yang meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja di industri, kepemilikan sertifikat pendidik, dan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang busana.

3) Relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri yang meliputi kebutuhan *hardskill* dan *softskill* lulusan serta program pendidikan yang dikembangkan oleh pihak sekolah.

Relevansi kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada dua dimensi yaitu internal dan eksternal. Relevansi internal terdiri dari komponen tujuan, konten, strategi penyampaian, dan evaluasi. Relevansi eksternal terdiri dari relevansi dengan kebutuhan peserta didik, kualifikasi guru, dan kebutuhan dunia industri. Kebutuhan peserta didik terdiri dari minat, cita-cita, dan perolehan pengalaman belajar yang optimal. Kualifikasi guru terdiri dari latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja di industri, kepemilikan sertifikat pendidik, dan pengalaman pendidikan pelatihan dalam bidang busana. Kebutuhan industri terdiri dari kebutuhan untuk memperoleh lulusan SMK dengan kompetensi *hardskill* dan *softskill* yang memadai.

b. SMK Program Keahlian Tata Busana

SMK merupakan satuan pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari pendidikan dasar yang bertujuan mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu. (UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 pasal 15 dan 18). SMK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

SMK yang menjadi fokus penelitian adalah SMK Program Keahlian Tata Busana dengan kompetensi keahlian busana butik. Selain kompetensi butik, kompetensi lain yang dikenal dalam lingkup program keahlian tata busana adalah garmen, konfeksi, sanggar busana dan *fashion design*. Tujuan Program Studi Keahlian Tata Busana kompetensi butik adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap professional dalam bidang busana khususnya busana butik. Kompetensi keahlian busana butik adalah suatu jenis keahlian yang mengajarkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam usaha pembuatan, penjualan, pesanan membuat busana dengan jahitan teknik kualitas tinggi dengan penjualan perlengkapan busananya Usaha busana jenis ini biasanya tidak menjual busana dalam jumlah massal (Tati,2010). SMK Program Keahlian Tata Busana yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah SMK negeri dan swasta Program Keahlian Tata Busana kompetensi butik yang ada di Kota dan Kabupaten Bandung.

c. Kebutuhan Stakeholder

Stakeholder diartikan secara sederhana sebagai pemangku kepentingan. *Stakeholder* dalam bidang pendidikan diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan sendiri dipandang sebagai sebuah sistem, dimana semua komponen yang terlibat di dalamnya bahu membahu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Stakeholder dalam bidang pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok utama yaitu sekolah, pemerintah, dan masyarakat (Raga; 2010). *Stakeholder* sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan staf sekolah. *Stakeholder* pemerintah terdiri dari pengawas, penilik, dinas pendidikan setempat, Direktorat Pembinaan SMK, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Stakeholder* masyarakat diantaranya orang tua peserta didik, pengamat pendidikan, dan dunia kerja.

Stakeholder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru, peserta didik dan dunia industri yang merupakan bagian dari sistem SMK Program Keahlian Tata Busana di Kota dan Kabupaten Bandung. Pembatasan ruang lingkup *stakeholder* tersebut, dikaitkan dengan konsep kurikulum sebagai sistem dalam lingkup mikro yang terdiri dari guru, peserta didik, sarana prasarana, dan dunia industri.

Uraian definisi operasional di atas, memberikan gambaran bahwa penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap relevansi kurikulum SMK Program Keahlian Tata Busana kompetensi butik di SMK negeri dan swasta di Kota dan Kabupaten Bandung dengan kebutuhan guru, peserta didik, dan dunia industri sehingga didapat peta yang utuh tentang kondisi relevansi kurikulum di masing-masing SMK.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji relevansi kurikulum SMK Negeri dan Swasta Program Keahlian Tata Busana di Kota dan Kabupaten Bandung.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Memperoleh gambaran kondisi kurikulum SMK Negeri dan Swasta Program Keahlian Tata Busana di Kota dan Kabupaten Bandung, yang meliputi:
 - 1) Kondisi dokumen kurikulum yang dikembangkan meliputi rumusan tujuan, materi, strategi penyampaian, dan evaluasi.
 - 2) Kondisi kurikulum sebagai suatu sistem yang terdiri dari kondisi peserta didik, guru, lulusan, institusi pasangan industri SMK, dan proses pengembangan kurikulum SMK.
- b. Mengkaji relevansi kurikulum SMK negeri dan swasta Program Keahlian Tata Busana di Kota dan Kabupaten Bandung, yang meliputi kondisi:
 - 1) Relevansi kurikulum internal mencakup kesesuaian rumusan komponen-komponen kurikulum yaitu tujuan, konten, strategi penyampaian, dan evaluasi Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik.
 - 2) Relevansi kurikulum eksternal, yang meliputi:
 - a) Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik yang meliputi kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan minat, cita-cita, dan kebutuhan untuk memperoleh pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik.
 - b) Relevansi kurikulum dengan kualifikasi guru yang meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja di industri, kepemilikan sertifikat pendidik, dan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang busana.

- c) Relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri yang meliputi kebutuhan *hardskill* dan *softskill* lulusan SMK serta program pendidikan yang dikembangkan oleh SMK
- c. Menghasilkan peta kondisi relevansi kurikulum empat SMK yaitu SMKN 9 Bandung, SMKN 2 Baleendah Kabupaten Bandung, SMK BPP Bandung, dan SMK Pasundan Majalaya Kabupaten Bandung dengan mempergunakan analisis SWOT.
- d. Menghasilkan pemikiran tentang arah pengembangan kurikulum SMK program keahlian tata busana di masa depan?

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat penelitian ini dari segi teori adalah memberikan sumbangan pemikiran tentang aspek relevansi kurikulum SMK yang terdiri dari berbagai dimensi. Selama ini, kajian tentang relevansi kurikulum khususnya di pendidikan kejuruan hanya berkisar pada dimensi relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Hasil kajian justru menggambarkan bahwa banyak aspek yang dapat menjadi indikator relevansi kurikulum yaitu relevansi internal yang berkaitan dengan dokumen kurikulum dan aspek eksternal yang terkait tidak hanya dengan kebutuhan industri, akan tetapi terkait pula dengan kebutuhan peserta didik dan kualifikasi guru. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan akan memberikan pengayaan kajian tentang dimensi relevansi kurikulum khususnya di SMK.
2. Manfaat penelitian ini dari segi kebijakan pendidikan SMK di Indonesia menjadi sangat strategis. Kondisi ini dilatar belakangi fakta di lapangan bahwa lulusan SMK menempati urutan tertinggi pengangguran di Indonesia. Kajian yang komprehensif terkait dengan kurikulum sebagai salah satu produk kebijakan pendidikan dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan kurikulum yang ada khususnya tentang relevansi kurikulum SMK. Masalah kualitas lulusan SMK yang kurang maksimal dan bahkan belum sesuai dengan tuntutan apabila dibiarkan akan menjadi “bom waktu” yang merugikan dan mencederai pendidikan kejuruan di Indonesia.

Kurikulum dipandang sebagai sebuah sistem yang didalamnya terdiri dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Aspek kebijakan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kurikulum. Penelitian ini diharapkan akan membantu pengambil kebijakan kurikulum SMK baik level nasional (Direktorat Pembinaan SMK) maupun lokal (sekolah) untuk memiliki informasi tentang peta relevansi kurikulum SMK.

3. Manfaat penelitian ini dari segi praktik terkait dengan karakteristik KTSP yang menuntut guru dan sekolah untuk mampu mengembangkan sendiri kurikulum yang ada. Kajian tentang relevansi kurikulum ini akan memberikan gambaran kepada pihak sekolah tentang sejauhmana dokumen KTSP yang telah dirancang telah memenuhi prinsip relevansi kurikulum.
4. Manfaat penelitian ini dari segi isu serta aksi sosial yang aktual yaitu hasil kajian tentang relevansi kurikulum SMK akan bermanfaat bagi pencerahan arah pengembangan pendidikan SMK di masa depan. Persepsi sebagian masyarakat tentang citra SMK yang kurang baik sedikit-demi sedikit terhapus. SMK pada akhirnya akan menemukan arah yang tepat bagi penciptaan SDM yang berkualitas.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Secara umum, sistematika penulisan disertasi ini dimulai dari Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. Bab I ini memberikan gambaran yang utuh tentang permasalahan penelitian lengkap dengan variabel yang diteliti serta arah penelitian yang tergambar dalam tujuan penelitian.

Bab II kajian pustaka terdiri dari kajian teori dan hasil –hasil penelitian tentang konsep dasar kurikulum, kurikulum sebagai sebuah sistem, konsep dasar relevansi kurikulum, serta komponen-komponen relevansi kurikulum. Pada Bab II ini, akan tergambar tentang roadmap penelitian terkait dengan relevansi kurikulum di pendidikan kejuruan.

Bab III metode penelitian, terdiri dari lokasi dan sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta prosedur dan tahap-tahap penelitian. Pada Bab III ini tergambar metode untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Bab IV terdiri dari dua bagian utama yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian dideskripsikan hasil penelitian yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian.

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran yang menyajikan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan pada tujuan penelitian di Bab I.

